

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

NUR AFIFAH
NIM: 18.3.12.0041

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 06 Juli 2023 M
17 Zulhijjah 1444 H

Penyusun



Nur Afifah

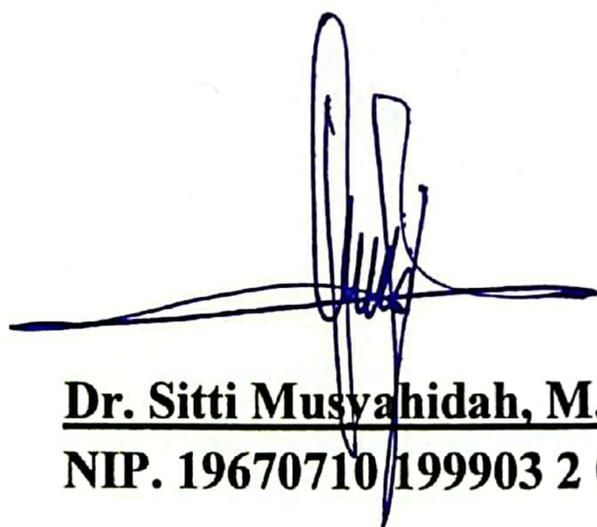
NIM. 183120041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)** ” oleh Nur Afifah NIM: 18.3.12.0041 Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di ajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji

Palu, 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

Pembimbing I



Dr. Sitti Musyahidah, M., Th.I.
NIP. 19670710/199903 2 005

Pembimbing II



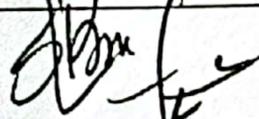
Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak.
NIP. 19780505 201503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nur Afifah Nim: 18.3.12.0041 dengan judul “ Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 29 Agustus 2022 M, yang bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 29 Agustus 2022 M
01 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag	
Munaqisy 1	Dr. Ermawati, S. Ag., M.Ag	
Munaqisy 2	Rizki Amalia, S.Si., M.Ak	
Pembimbing 1	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing 2	Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan karunianya –Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat).” Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak , sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Ibu penulis yaitu ibu farida dan bapak penulis yaitu sultan yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang dan senantiasa mendo’akan dan memberikan motivasi serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dasar sampai saat ini, Semoga Allah Swt membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat –Nya. Aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu serta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu yang telah banyak memberikan kebijakan penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama, Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni, dan kerja sama.
4. Bapak Nursyamsu, S.H.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Noval S.Sy., M.M, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M., Th,I. selaku pembimbing I dan Bapak Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Civitas Akademik UIN Datokarama Palu yang telah dengan ikhlas membagi ilmu dan memberikan pelayanan selama Penulis mengikuti rutinitas akademik.
7. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., M.M dan staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi dalam menyusun skripsi.

8. Seluruh Sahabat seperjuangan angkatan 2018 : Uswatun, Indar Pujianti, Enjela, Hardiani dan terkhusus untuk teman-teman ESY-2 Ang. 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan, dan motivasi serta bantuan materi maupun non materi, persahabatan dan kebersamaan yang berjalan selama ini yang membuat Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih juga kepada teman sekaligus sahabat KKN penulis : Nurafni safitri, Vira, Indah, Neviyanti, dan Arifah Tri Hapsari yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, persahabatan dan kebersamaan yang berjalan selama ini yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Surahman yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dan motivasi,serta bantuan materi maupun non materi kepada penulis.

Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut adil dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini yang tidak tertulis di sini, terimakasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi sempurnanya penelitian selanjutnya. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya bagi pembaca pada umumnya serta membuahakan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT. Aamiin

Palu, 06 Juli 2023 M
17 Zulhijjah 1444 H

Penulis



Nur Afifah
NIM : 18.3.12.0041

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	15
1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	15
2. Konsep Kemiskinan	24
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	35
C. Kerangka Pemikiran	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Kehadiran Penelitian.....	51
D. Data dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
G. Pengecekan Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambar Umum Objek Penelitian	57
B. Hasil Penelitian	
1. Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	

2. Hambatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat. 83
3. Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai Menurut Perspektif Ekonomi Islam... 89

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Fasilitas Layanan Kesehatan Kelurahan Lere.....	60
Tabel 4.2 Jumlah Bidang Pekerjaan Kelurahan Lere.....	61
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan akademik di Kelurahan Lere.....	63
Tabel 4.4 Kondisi Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jumlah Tamat Pendidikan Kelurahan Lere.....	64
Tabel 4.4 Nama Informan.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	49
Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Lere	58

ABSTRAK

Nama : Nur Afifah
Nim : 183120041
Judul Skripsi : Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)

Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat merupakan salah satu tempat yang menerima bantuan tersebut sejak tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lere, Apa saja hambatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap (KPM) dan apa solusinya, Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana peneliti turun langsung kelapangan, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *interview*, *observasi*, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah program BPNT di Kelurahan Lere ini belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T. Bahwa program BPNT di Kelurahan Lere ini hanya dapat memenuhi 4 indikator saja yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dan program BPNT di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya. Karena program BPNT di Kelurahan Lere ini hanya dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam membeli beras dan telur, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan yang lain.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Untuk tercapainya kesuksesan pelaksanaan program BPNT dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi dan berjalan dengan baik. Sesuai dengan indikator 6T yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada masyarakat untuk bersikap aktif dalam melakukan kontrol setiap kebijakan penguasa yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan mengurus urusan umat. Diharapkan adanya tinjauan ulang ke lapangan dari pihak yang kompeten agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran

Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kesejahteraan Masyarakat, Perspektif ekonomi islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan atau sejahtera menurut sisi ekonomi, orang dikatakan sejahtera manakala memiliki pendapatan dan kekayaan yang berlimpah. Sedangkan sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Dari ketiga kata yang mencakup dalam definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), (c) serba kecukupan (yang berarti makmur)¹

Dalam firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 61 tersebut Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk terus bekerja (berusaha) mencari sumber penghidupan. Karena dengan kita bekerja kita telah memerangi kemiskinan, mencapai kekayaan, dan menciptakan kemakmuran. Dimana dalam tugas ini Allah SWT telah memilih manusia untuk mengelolanya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan di Indonesia bukan merupakan masalah baru. Sesudah Indonesia merdeka, masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia, baik dari masa orde lama, orde

¹ Munawar Ismail, Dwi Budi Santoso, Ahmad Erani Yustika, *Sistem Ekonomi Indonesia*, 56.

baru bahkan sampai masa reformasi pada detik ini. Meskipun usaha demi usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna menaggulangi kemiskinan, namun masalah tersebut tetap hidup bersama bangsa ini.²

Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Banyak sekali masalah kemiskinan yang dihadapi oleh banyak Negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Kemiskinan memang haruslah segera ditangani secara serius oleh individu itu sendiri dan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya. Oleh karena itu, berbagai upaya di lakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan subsidi seperti pemberian program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan (*e-warong*) yang bekerjasama dengan bank. Pelaksanaan Program BPNT tahun 201 8,

² Syaiful Ilmi. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmu Syari'ah: Vol. 13 No. 1, April 2017)

³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 326.

dianggap sebagai *pilot project* dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan non tunai (BPNT) secara nasional.⁴

Sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tujuan pelaksanaannya meliputi aspek 6 T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Administrasi diharapkan dapat bermanfaat sehingga kebijakan dari program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. BPNT yang tujuannya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan tersebut, ini masih belum tercapai dalam meningkatkan kesejahteraan

Terdapat 504 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 6 RW dan 33 RT yang nantinya mendapatkan bantuan. KelurahanLere merupakan salah satu Kelurahan yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT di Kelurahan Lere mulai dilaksanakan pada bulan oktober 2018. Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), nama-nama yang terdata akan mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi, mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, setelah itu kartu dapat diambil di Kecamatan Palu Barat. Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima uang sebesar Rp 110.000, per bulan selanjutnya dari tahun 2020 jumlah bantuan tersebut naik sebesar 200.000/KPM per bulan yang ditransfer setiap

⁴Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi. *Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non –Tunai (BPNT)*, (*Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, Juni 2018*), 2

bulannya melalui kartu elektronik. Dengan adanya kartu elektronik, peserta Kepala Rumah Tangga Miskin (RTM) bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras, telur, ayam dan tempe yang tersedia di beberapa lokasi e-Warung KUBE yang telah ditetapkan. melalui sebuah kartu yang diterima. e-WarungKUBE singkatan dari Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama merupakan warung penjual sembako/bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank BTN. Program BPNT juga memberikan kreatifitas kepada pendamping agar anggotanya menjadi mandiri dengan mendorong peserta KPM untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah seperti kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha ekonomi produktif.⁵ Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Lere diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan harapan mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Alasan penulis meneliti judul ini karena peneliti tertarik meneliti tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan dilihat dari perspektif ekonomi islam, karena program BPNT ini merupakan pembaruan dari program raskin dan program rasta yang mana program tersebut memang sudah cukup lama ada dan sudah sampai tiga kali diperbarui dan yang terakhir ini bernama program BPNT dan pada saat *Prasurvey* peneliti menemukan beberapa masalah, Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan sementara, menunjukkan bahwa program

⁵ Wawancara dengan pak Hairullah, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17/06/2022, pukul 07.00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Ibu Farida, penerima program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17/06/2022, pukul 14.00 WIB

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Lere belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Sebagai contoh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Ibu Farida menyatakan bahwa pendataan penerima bantuan yang kurang sesuai sehingga masih terdapat kecemburuan sosial. Akan tetapi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangat membantu meringankan beban kebutuhan hidup keluarga bagi penerima bantuan.⁷ Hal itu juga dirasakan oleh Ibu Atika, dalam Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menegaskan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut dibandingkan program sebelumnya. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa proses BPNT saat ini mudah dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM sehingga memberikan manfaat positif. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT di Kelurahan Lere masih terdapat ketepatan waktu yang kurang tepat, yang seharusnya satu bulan sekali ini bisa sampai tiga atau dua bulan sekali, padahal bantuan ini semestinya setiap sebulan sekali.

Atas dasar permasalahan yang dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi: Kasus Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)”.

⁷ Wawancara dengan Ibu Atika, penerima program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17/06/2022, pukul 15.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat ?
2. Apa saja hambatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan apa solusinya ?
3. Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai Menurut Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
- b. Untuk Mengetahui hambatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan apa solusinya
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai Menurut Perspektif Ekonomi Islam

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai temuan empiric bagi penulis maupun pembaca dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan penulis selanjutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui keadaan sebenarnya mengenai penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat

D. Penegasan Istilah

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam “ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

2. Program

Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-Warong* yang bekerjasama dengan bank penyalur.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan yaitu keadaan yang baik atau kondisi yang dialami oleh para manusia dimana orang-orang nya telah berada dalam keadaan yang damai, sehat dan juga makmur

5. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk kehidupan berbudaya rakyat.

6. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Yang dimaksudkan cara-cara yang islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi.

E. Garis-Garis Besar Isi

Garis-garis besar isi proposal ini, masing-masing bagian yang akan penulis rinci sebagai berikut:

Bab I mengenai pendahuluan, menguraikan latar belakang yang menjelaskan tentang alasan pemilihan judul yang dikuatkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah yang berisi tentang penjelasan atau sasaran yang dituju dan garis-garis besar isi.

Bab II menguraikan penelitian terdahulu yang merupakan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian dan membahas tentang efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

Bab III ini mengenai metodologi penelitian berisi pendekatan dan desain penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan atau strategi apa yang akan penulis gunakan dalam meneliti yaitu penelitian kualitatif, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil pembahasan, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang gambaran umum Kelurahan Lere yang sub pembahasannya tentang

struktur organisasi Kelurahan Lere, Letak geografis dan kondisi sosial masyarakat Kelurahan Lere. Di bab ini juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan BPNT di Kelurahan Lere dan bagaimana BPNT dalam perspektif ekonomi islam.

Bab V penutup, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis rencanakan sebagai berikut:

1. Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi⁸, yang membahas tentang “Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)” pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan perspektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan variabel penelitian efektivitas, program, Rastra, BPNT, dan beras dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
2. Tondhi Ramadhan⁹, yang membahas tentang “Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru” pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru dengan variabel penelitian program BPNT, masyarakat, Kecamatan Tampan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

⁸ Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi, *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, 2018)

⁹Tondhi Ramadhan, Syamsul Bahri, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 5 Edisi II, 2018)

3. Nurfitriah¹⁰, Yang Membahas tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Bou Kecamatan Sojol). Pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Program PKH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bou Kecamatan Sojol dengan menggunakan penelitian Kualitatif deskriptif

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi. 2018	Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ¹⁰	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT, permasalahan utama dalam program Rastra harus segera diselesaikan, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, rapel beras, jumlah beras yang diterima, dan kualitas beras yang masih rendah. Sementara pada	Menggunakan metode kualitatif, Membahas tentang program bantuan pangan non tunai	Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas efektivitas dan variabel kesejahteraan masyarakat nya ditinjau perspektif ekonomi islam, Objek

¹⁰ Nurfitriah, *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (studi pada masyarakat Desa Bou Kecamatan Sojol)* (Skripsi Febi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu (2020)

			program BPNT masalah kesiapan e-warong dan jangkauan signal GPRS di semua wilayah, sasaran penerima dan kualitas beras juga perlu segera diatasi.		Penelitian
2.	Tondhi Ramadhan . 2018	Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru	Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas program BPNT di Kecamatan Tampan secara keseluruhan dalam kategori baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tampan secara keseluruhan.	Menggunakan metode kualitatif, Membahas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas efektivitas dan variabel kesejahteraan masyarakatnya ditinjau dari perspektif ekonomi islam, Objek Penelitian
3.	Nurfitriah 2020	Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (studi pada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program (PKH) di Desa Bou belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bou, berdasarkan konsep	Menggunakan metode kualitatif, Sama-sama melakukan penelitian terhadap masyarakat, Objek Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian ini Penelitian terdahulu membahas tentang pkh

		masyarakat Desa Bou Kecamatan Sojol)	kesejahteraan yang dapat dilihat dari beberapa kondisi masyarakat penerima manfaat, dimana ada beberapa kondisi program ini tidak memberika pengaruh yang signifikan karena program PKH di Desa Bou hanya dapat memberikan biaya Pendidikan anak		penelitian ini membahas tentang BPNT
--	--	---	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan dan Dasar Hukum

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Dari ketiga kata yang mencangkup dalam definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila

setidak-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: 1. Terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), 2. Terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), 3. Serba kecukupan (yang berarti makmur).¹¹

UU No. 11 Tahun 2009 menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu bentuk kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan masyarakat baik material, maupun spiritual agar dapat terpenuhinya kehidupan yang layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.¹²

Menurut Humon (2016) menyatakan bahwa Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan tercapainya kebutuhan dasar yang dapat dilihat dari rumah layak huni, tercapainya kebutuhan dasar baik yang dilihat dari kebutuhan sandan maupun pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang relatif murah dan berkualitas sehingga dapat tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹³

¹¹ Munawar Ismail, Dwi Budi Santoso, Ahmad Erani Yustika, *Sistem Ekonomi Indonesia*, 56.

¹² Ahda Sulukin Nisa, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), 19

¹³ Riski Ulfa Nazilla, "Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Desa Genceu Komplek Kecamatan Banda Raya, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), 20

Menurut Prabawa (1988) Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga¹⁴

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan sosial baik dilihat dari material maupun spiritual dalam hal keamanan, keselamatan, dan ketenteraman hidup baik dalam hal tata kehidupan sosial, material, maupun spiritual dalam melakukan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Rambe (2004).¹⁵

Seperti firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 6 bahwa Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Terjemahan :

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu

¹⁴ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara" Jurnal Geografi, Vol 9 No.1, 2017, 57.

¹⁵ Ayu Triana, "Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi organik dan anorganik" (Skripsi, fakultas pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), 32.

dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*).¹⁶

b. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan menurut islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dua saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.¹⁷

Kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), 222

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 4.

ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:¹⁸

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Tafakul (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.¹⁹

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63.

¹⁹ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), 95

c. Fungsi Kesejahteraan Sosial dan Cara Meningkatkan Kesejahteraan

Menurut Friedlander dan Apte fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber dayasosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.²⁰

Cara yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan:

a. Zakat

Zakat merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang memiliki kelebihan harta. Rukun islam yang ketiga ini tidak hanya memiliki dimensi vertikal (*habluminallah*) yang bersifat ibadah, namun juga memiliki dimensi horizontal (*habluminannas*) yang mencakup aspek sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi islam karena merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam.²¹

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.²²

²⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan*, 12

²¹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI&ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 383

²² Budi Arsanti, "Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah (LAZIS)". (Skripsi Program Sarjana Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), 34.

Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²³

c. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam islam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Instrumen ini termasuk ke dalam sedekah sunnah, namun memiliki kedudukan yang sangat penting dalam islam seperti halnya sedekah- sedekah yang lainnya.²⁴

Hal ini akan berbeda apabila semua beban tersebut hanya dipikul oleh negara yang memiliki dana terbatas dengan tugas dan kewajiban yang begitu banyak. Berbeda dengan pajak yang merupakan partisipasi publik yang bersifat wajib dan memaksa, wakaf merupakan bentuk partisipasi publik yang bersifat sukarela.²⁵

d. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indicator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator yang bisa digunakan didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga,

²³ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 1 Angka 3

²⁴ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI&ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 384.

²⁵ *Ibid*, 388

keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial, maupun agama.
- b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarganya.
- c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama masyarakat sekitar, beribadah khusyuk disamping terpenuhi kebutuhan pokok.

e. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan

utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.²⁶

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ٤

Terjemahan :

*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah,. Yang telah memberikan makanan dari kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.*²⁷

2. Konsep Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan kondisi seperti ini, ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan

²⁶ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, (Equilibrium: Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 388

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 388

tetapi berdampak pada ketidak- mampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²⁸

Kemiskinan menurut Emil Salim, kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lainlain. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.²⁹

Kemiskinan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Analisanya juga bisa beragam begitupun solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Meskipun banyak program pengentasan kemiskinan, namun sampai saat ini masalah kemiskinan belum sepenuhnya bisa diatasi. Memang kemiskinan memiliki permasalahan yang kompleks, dimana akar penyebabnya seperti benang kusut yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga sulit untuk memutus rantainya.³⁰

²⁸ Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08, No. 03, September, 2005), 112

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 365.

³⁰ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 112

b. Faktor-faktor Timbulnya Kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, yaitu:

a. Pendidikan Yang Terlampau Rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Malas Bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Atau bersifat pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik dari keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.³¹

c. Keterbatasan Sumber Alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli, bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya "Alamiah Miskin". Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya

³¹ *Ibid.*, 344

tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.

d. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa "Skill" maupun modal.

e. Beban Keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak atau meningkat pula tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan penambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat latent.³²

c. Program Pengentasan Kemiskinan

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas

³² *Ibid.*, 346.

harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin³³

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman, kemiskinan di tingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan, kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang sangat miskin (hard rock), misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya

³³ Nasrin Nasrin, Ermawati Ermawati², Uswatun Hasanah *Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol* (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No. 1 Tahun 2019), 47.

program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah dan Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) yang saat ini ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupa bantuan tunai maupun non tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.

Secara umum masyarakat miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu golongan miskin sekali (fakir miskin), miskin, dan hampir miskin (rentan terjadi miskin). Untuk masyarakat golongan fakir miskin pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti bantuan raskin, bantuan tunai langsung, beasiswa, jamkesmas, dan sebagainya. Dalam realisasinya, bantuan tersebut ternyata tidak mudah. Masyarakat lebih suka mengaku sebagai fakir miskin dengan harapan mendapat berbagai bantuan gratisan tersebut. Akibatnya sifat ketergantungan semakin meningkat.³⁴

d. Mengatasi Permasalahan Kemiskinan

Cara Mengatasi Permasalahan Kemiskinan

a. Memperluas lapangan kerja.

Cara yang satu ini cukup ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, dimana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan.

b. Memberikan bantuan pendidikan secara gratis.

³⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: ALFABETA), 83

Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping itu, pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja.

- c. Memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis.

Pemerintah sebaiknya membantu dalam memberi fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera.

e. Pengertian Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tidak punya harta (uang), sekaligus tidak punya penghasilan.³⁵

Salah satu ayat al-Qur'an yang membahas tentang miskin dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Balad ayat 16:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

³⁵ Sri Budi Cantika Yuli, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ekonomika-Bisnis: Vol. 4 No. 2 Juli 2013), 103

Terjemahan:

*atau orang miskin yang sangat membutuhkan.*³⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Balad ayat 16 ini menjelaskan bahwa miskin adalah: “Yakni sangat miskin sehingga menempel di tanah, lagi tak punya apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa *dza matrabah* artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sesuatu yang dapat menghindarinya dari menempel di tanah.

Al-Qur’an, mengisyaratkan bahwa Allah adalah Sang Pemilik dan Penguasa Seluruh Alam, termasuk segala isinya. Maka dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa manusia yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakikatnya hanya sebatas menerima dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Maka sebagai konsekuensinya ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta sedekah dan infak. Allah menjadikan harta sebagai alat dan sarana kehidupan seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan mereka bersama. Pemberian zakat, sedekah dan infak yang diajarkan Islam mengarahkan pada nilai solidaritas dan persaudaraan terhadap sesama.³⁷

Umat Islam Indonesia yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan memahami bahwa kemiskinan yang mereka derita adalah takdir (ketetapan yang tidak bisa diubah) dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah telah menentukan hidupnya miskin, jadi segigih apapun mereka berusaha, hasilnya tetap miskin. Kerjapun akhirnya dipahami hanya untuk memenuhi dan

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 594

³⁷ Yuliyani, *Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*, (Iqtishadia: Vol. 8, No. 1, Maret 2015), 152

menyambung hidup, dan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ironisnya ada pula yang tidak mau bekerja, karena dianggap sia-sia dan bagi mereka seberapa besar rizki itu telah ditentukan Allah dan manusia hanya menunggu saja.³⁸

f. Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengatur sedemikian rupa menyangkut masalah kemiskinan umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, diantaranya adalah kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian dan kebakhilan orang kaya yang menyebabkan orang miskin semakin terjerat dari lingkaran kemiskinannya.³⁹

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam Islam dibagi pada tiga hal pokok.⁴⁰ yaitu :

a. Kewajiban Setiap Individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup di muka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di bumi Allah SWT serta makan dari rezeki-Nya.

b. Kewajiban Kelompok Atau Masyarakat

³⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), 126

³⁹ Yuliyani, *Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah terhadap Isu Kemiskinan*, (Iqtishadia: Vol. 8, No. 1, Maret 2015), 152

⁴⁰ Kartiawati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), 38

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Islam juga tidak bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti ialah zakat.

g. Indikator Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ada dua indikator pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu:

a. Rekonstruksi Teologi Kemiskinan

Rekonstruksi teologi yang dimaksud adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-mata disebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis ‘miskin’ itu sendiri, yaitu ‘diam atau tidak bergerak’. Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri.

Padahal Allah swt, telah menjamin rizki setiap orang di muka bumi. Kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan keluar dari rongrongan kemiskinan. Allah berfirman dalam QS. Az-zariyat ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Terjemahan :

*Sesungguhnya Allahlah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh.*⁴¹

b. Membangun Etos Kerja Individu

Tawaran yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam etos kerja terkandung “spirit” atau semangat untuk mengubah sesuatu jauh lebih baik. Dengan etos kerja pula, kemiskinan dapat diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.⁴²

Salah satu ayat yang mendorong setiap individu untuk membangun etos kerja adalah QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

*Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.*⁴³

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 524

⁴² Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmu Syari'ah: Vol. 13 No. 1, April 2017), 76-82

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 554

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di eWarong/ pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.⁴⁴ Program lanjutan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, sayur, buah dan lainnya di toko atau agen khusus yang diberi nama e-warong. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat adminstasi dan tepat jumlah. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp.110.000/KPM/bulan, selanjutnya dari tahun 2020 jumlah bantuan tersebut naik sebesar 200.000/KPM/bulan yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, telur, kentang, dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan

⁴⁴ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan sosial Secara Non, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Cetakan Pertama (Jakarta Pusat: Undang-Undang, 2017) h 5

suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.⁴⁵

Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai yang dilaksanakan pada tahun 2017 baru dilakukan pada 44 Kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan sisanya masih menggunakan pola natura (Rastra). Mulai tahun 2018 subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura yaitu tetap dalam bentuk beras.

Keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya harus diatur dengan baik.

B. Tinjauan Tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Landasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non- Tunai adalah sebagai

berikut:

- a. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.⁴⁶

⁴⁵ WulanS eptiriana, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara) Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, 21

⁴⁶ Edi Suharto, Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 22- 176.

- b. Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁴⁷
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.
- d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.⁴⁸

2. Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Menurut buku Panduan Pangan Non Tunai Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus memenuhi prinsip:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-warong;
- b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan;

⁴⁷ Mudrajat Kuncoro, Dasar- Dasar Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 268.

⁴⁸ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017, 4.

- c. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi;
- d. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan kerekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- e. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- f. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); dan
- g. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.⁴⁹

3. Kebersertaan dan Sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Kebersertaan

Informasi mengenai kebersertaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dikonfirmasi kepada pengurus RT/RW, perangkat Desa/Aparatur Kelurahan di wilayah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Tenaga Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat, atau kepada Bagian Humas Kementerian Sosial Kebersertaan Keluarga Penerima

⁴⁹ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Cetakan Pertama, Jakarta Pusat, 2017. 11.

Manfaat (KPM) di dalam Program Bantuan Pangan Non (BPNT) dapat berganti karena:

- a. Meninggal dan merupakan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beranggota tunggal
- b. Merupakan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seluruh anggotanya pindah ke desa/kelurahan lain
- c. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menolak/ mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- d. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat ganda atau lebih dan
- e. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu.

b. Sasaran

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini.⁵⁰

c. Mekanisme Pelaksanaan

⁵⁰ Rohana Tiara, —Demography Journal of Sriwijaya (DeJos) Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),l 2019, 37–46.

Adapun mekanisme dari penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, yaitu:

1. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) langsung datang ke e-warong terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Petugas di Desa dan pengurus agen e-warong yang mendampingi mereka menarik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang ada pada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengurus proses penggesekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Kemudian Petugas menyatukan bukti transaksi yang didapat dari E-warong dengan Buku Rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sebelumnya diminta dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Setelah itu, kartu akan dibagikan dengan kertas kecil yang diberi nomor urut untuk memudahkan pada saat pengambilan manfaat yang dilaksanakan di e-warong.
4. Lalu para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mengantri dan menunggu untuk dipanggil berdasarkan nomor antrian yang telah dibagikan sebelumnya. Oleh Petugas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
5. Terakhir, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pulang dengan membawa 10 Kg beras beserta bahan pangan lainnya dan Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) mereka akan dikembalikan dengan bukti transaksi penggesekan pada EWarong.⁵¹

d. Persiapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Persiapan E-Warong

Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan pihak lain untuk menjadi e-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan kegiatan lainnya. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen atau toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian keluarga penerima manfaat.
- c. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
- d. Dapat melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Non Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

⁵¹ Adinda Syifa Dinarila Balqis, Dkk —Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjar negara, | Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 2, no. 1 (2020).

- e. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- f. Lanjut usia dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) distabilitas.⁵²

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh eWarong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. E-Warong tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya (yang termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral). E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program Sembako oleh Bank Penyalur.⁵³

2. Sosialisasi dan Edukasi

Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:

⁵² Syakhrudin Dn Aspar, "Implementasi Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Washiyah* Volume 1, No. 2 (2020), 305

⁵³ Pedoman Umum Program Sembako 2020, 42

- a. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
- b. Memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- c. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).⁵⁴

3. Pendaftaran peserta

Proses Pendaftaran Peserta dilakukan secara bersama oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan petugas dari Bank Penyalur untuk masing-masing desa/kelurahan di Kantor Desa atau Kantor Kelurahan. Proses Pendaftaran Peserta

adalah:

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima pemberitahuan /undangan, datang membawa dokumen pendukung registrasi
- b. Petugas Bank Penyalur mencocokkan kesesuaian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- c. Jika data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai, maka Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serahkan dan diaktivasi oleh Petugas Bantuan.

⁵⁴ Yustina Yusuf Dkk, —Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai, *Ejournal Administrasi Negara*, *Ejournal.An.Fisip-Unmul.Ac.Id* © Copyright 2019 7, No. 3 (2019): 9215–27.

4. Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu antara lain;

a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan dilokasi dengan kriteria;

- Terdapat e-warong
- E-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Peserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di persyaratan sebagai berikut:

- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- Yang tergolong peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial, diutamakan berasal dari peserta Program Keluarga Harapan.

4. Pengukuran keberhasilan pengelolaan program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT):

Kaitannya dengan pengelolaan program BPNT, maka yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program BPNT adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

1. Tepat sasaran penerima manfaat; BPNT hanya diberikan kepada KPMkeluarga penerima manfaat BPNTkarena kurang mampu/ miskin kemudian didata dan diberi identitas Kartu Keluarga Sejahtera KKS.
2. Tepat jumlah; Jumlah saldo yang merupakan hak penerima manfaat Rp110,000,00 per bulan melalui kartu elektronik tersebut.
3. Tepat waktu; Waktu pelaksanaan BPNT kepada keluarga penerima manfaat KPMsesuai dengan Rencana.
4. Tepat harga; Harga tebus BPNT sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
5. Tepat kualitas; Terpenuhi persyaratannya kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Medium.
6. Tepat administrasi; Terpenuhi persyaratannya Administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Untuk mencapai efektivitas penyaluran BPNT, maka mekanisme pelaksanaannya perlu diatur dengan baik sebagaimana dikemukakan dalam buku Pedoman Umum “Raskin” (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2012.⁵⁵

⁵⁵ Singgih Panggayuh, Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dalam Skripsi, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2014, 26.

5. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan pangan kepada KPM, memberikan pilihan dan kendali KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan juga mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Goals/SDGs). Kemudian untuk manfaat adanya BPNT adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatnya transaksi nontunai untuk mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), dan juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang usaha penjualan beras dan/atau telur.⁵⁶

Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (social security) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Skema ini umumnya diberikan kepada orang berdasarkan “tes kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya, seperti membayar pajak atau premi asuransi. Keluarga miskin, penganggur, anak- anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatimpiatu, orang tua tunggal,

⁵⁶ TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019*, 2

pengungsi, korban bencana alam atau konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial.⁵⁷

6. Keadilan dalam Mekanisme Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁵⁸

Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan pada tempatnya berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Saat ini, kata adil dan Keadilan sudah menjadi sebuah nilai sentral dalam budaya Indonesia modern.⁵⁹

Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat, dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia selama timbangannya benar dan tangan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan

⁵⁷ Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013), 88- 89.

⁵⁸ Anonim, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 50-51.

⁵⁹ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita,1999), 88.

dan kebahagiaan. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:⁶⁰

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Menurut Murtadha Muthahhari, mengemukakan bahwa adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 135

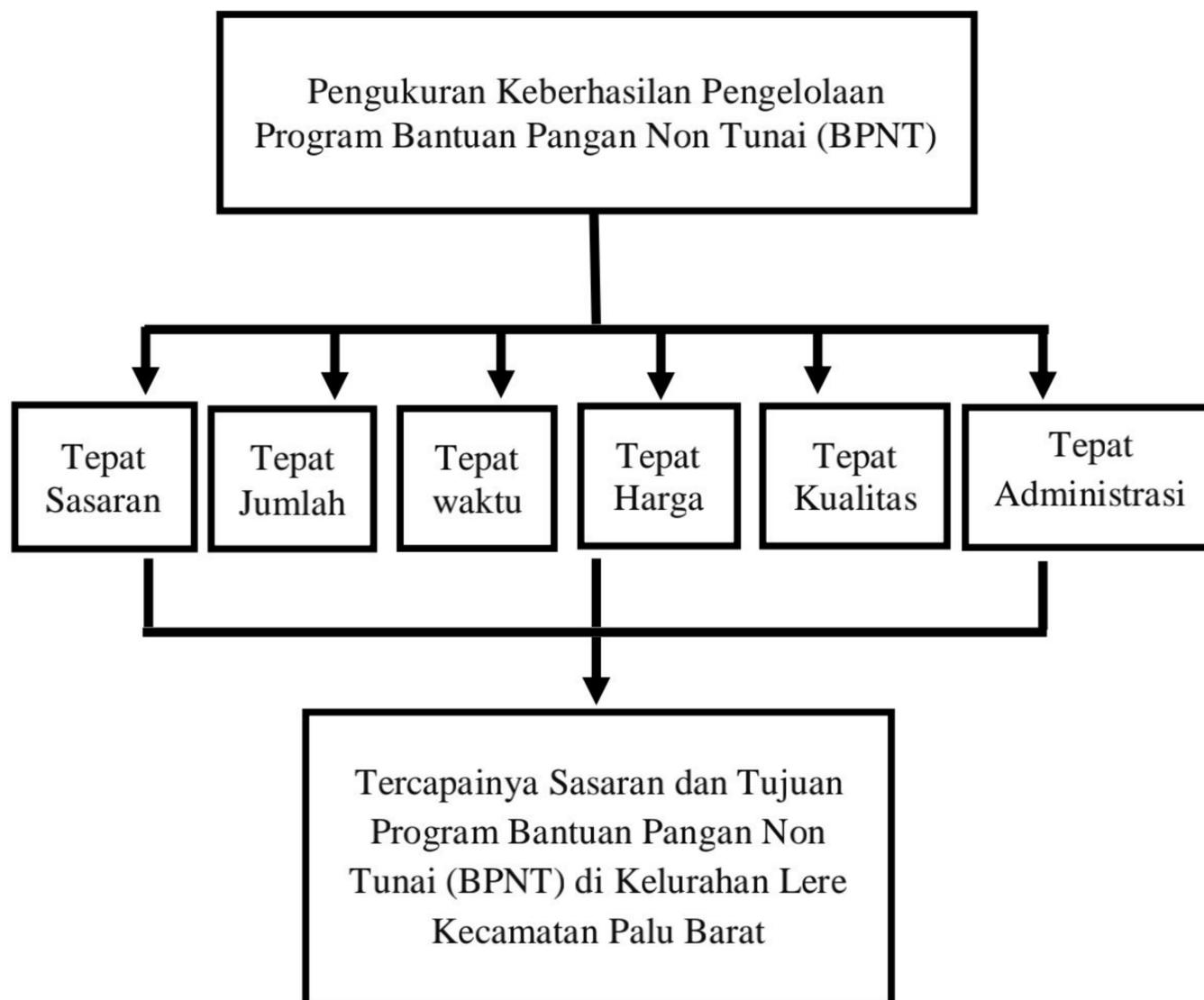
⁶¹ Mawardi Ahmad, —Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahil, *Jurnal Ilmiah keislaman*, (Pekan baru) Vol. 5 Nomor 2, 2006, 294-296.)

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah sebuah konsep penelitian yang dibuatkan berdasarkan pola pikir penelitian sendiri dengan maksud dapat mempermudah langkah penelitian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini bermaksud mengamati pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti menemukan data dari hasil wawancara dan dokumen yang penting yang ada di Dinas Sosial Kota Palu.

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Maleong, mendefinisikan metode kualitatif adalah “ sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut mereka”,⁶²

Jadi penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang harus berorientasi pada aspek penjelasan secara cermat terhadap objek yang akan diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat. Alasan peneliti memilih Kelurahan Lere sebagai lokasi penelitian dikarenakan Lere merupakan salah satu kelurahan yang masyarakatnya banyak menjadi penerima BPNT. Dan yang terpenting walaupun BPNT di Kelurahan Lere sudah dilaksanakan dari tahun 2018 tetapi masalah ini belum pernah diteliti. Hal ini menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan penulis sehingga memilih Kelurahan ini sebagai tempat penelitian.

⁶² Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Maleong, metode penelitian kualitatif (ed: XXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam Mengadakan penelitian, penulis berperan sebagai pengumpulan data, sebagai instrument dan sebagai pengamat.⁶³ Sebagai instrumen utama, penulis dapat berhubungan dengan informan dan mampu memahami, menggapai dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi dilapangan. Selain itu, penulis mengadakan pengamatan berperan serta yang artinya penulis melakukan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Kehadiran penulis merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dengan terjun langsung di lapangan penulis bisa mengetahui langsung apa yang sedang terjadi di lapangan dan dengan itu penulis bisa mendapatkan data dengan valid atau tidak rekayasa.

D. Data dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder⁶⁴ :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁵ Dengan kata lain, diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya yaitu

- a. Kasi pemerintahan Kelurahan Lere
- b. Petugas pelaksana program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pendamping BPNT di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat

⁶³ Ana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja, 2002), 13.

⁶⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 55

c. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kelurahan Lere

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada, mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶⁶ Adapun data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip laporan kegiatan resmi yang ada di Kelurahan Lere, artikel, informasi dari jurnal dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah :⁶⁷

1. Observasi

Metode obsevasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam tehnik observasi pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan judul.

⁶⁶ Sujono Soekarto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12

⁶⁷ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012), 165-199.

2. Wawancara

Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara peneliti mewawancarai responden yang berjumlah 5 orang terdiri dari masyarakat kelurahan lere dan pendamping BPNT yang terdapat di Kelurahan Lere.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi berdasarkan sumber data. Metode dokumentasi juga merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode obserervasi dan wawancara.

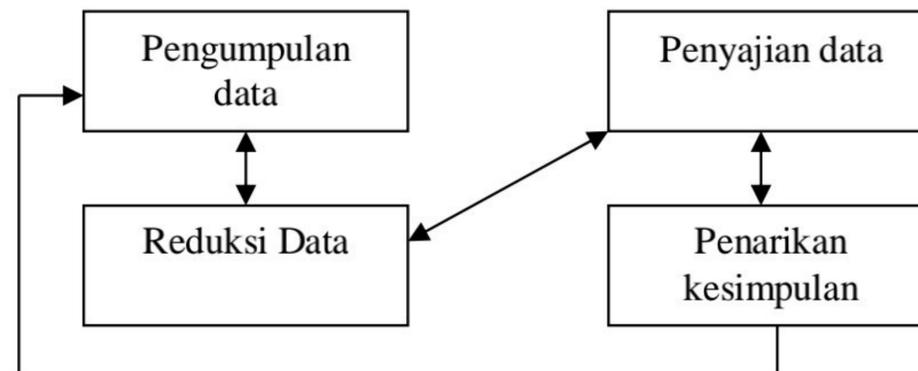
F. Teknik Analisis Data

Data yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan jenis penelitian, melalui teknik ini, penulis berusaha mengungkapkan dan memberi penjelasan penelitian serta menempatkan sasaran penelitian sebagai subyek yang memberi arti secara penuh suatu kondisi factual (menjadi obyek), sehingga memperoleh hasil yang di harapkan (kualitas).

Prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. ⁶⁸

⁶⁸ Sugiyono. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data



Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saat sebelum, selama dan sesudah : pengumpulan data dalam bentuk yang untuk membangun wawancara umum. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Hal tersebut terjadi karena dengan penyajian data akan dapat di pahami apa yang ada sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman tersebut. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu makna-makna yang muncul dalam data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji pengecekan keabsahan data yang digunakan penulis adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan ada 3 yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Dilakukan peneliti untuk pencairan data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan metode-metode ini kemudian dibandingkan sehingga diperoleh data yang dipercaya.

3. Triangulasi Teori

Dengan cara membandingkan dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan akan menyamakan persepsi atas data yang diperoleh.

Disamping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data diatas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-

rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.⁶⁹

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan Dosen Pembimbing.

⁶⁹ Lexy.Jm Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330-331.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Lere

Wawancara dengan bapak Efendi Kasi pemerintahan dan ketertiban umum: “Sejarah penamaan Kelurahan Lere, Dulunya Kelurahan lere bernama desa panggona setelah itu pada tahun 1990 sudah beralih dari desa panggona ke Kelurahan Lere Kelurahan lere itu diambil dari nama tumbuhan merambat yang menjalar di sekitar pesisir pantai yang orang tua dulu namakan tumbuhan lalere, mulai dari muara Sungai Palu hingga kawasan Silae. Untuk nama Panggona dan Ponggavia membumi di abad XVIII, sebagai daerah yang berada di sekitar wilayah Siranindi (Tangga Banggo), Bungi dan Boyantongo (Kampung Baru) saat ini. Nama tersebut, kemudian terdegradasi dengan adanya penyebutan Kampung Lere, dikarenakan banyaknya vegetasi pantai, yang oleh masyarakat Kaili, disebut sebagai tumbuhan Lere di sepanjang pantai. Sejak saat itu, nama Ponggavia dan Panggona, hilang dan tergantikan oleh Kampung Lere. Nama Panggona ini melekat pada kawasan Lere, setidaknya hingga masa pemerintahan Magau Yodjokodi, pada periode akhir 1800-an atau akhir abad ke 19. Hal ini terlihat pada buku *De West-Toradjas op Midden-Celebes* yang terbit pada 1938, yang telah menyebutkan nama Lere, sebagai nama untuk kawasan tersebut.”⁷⁰

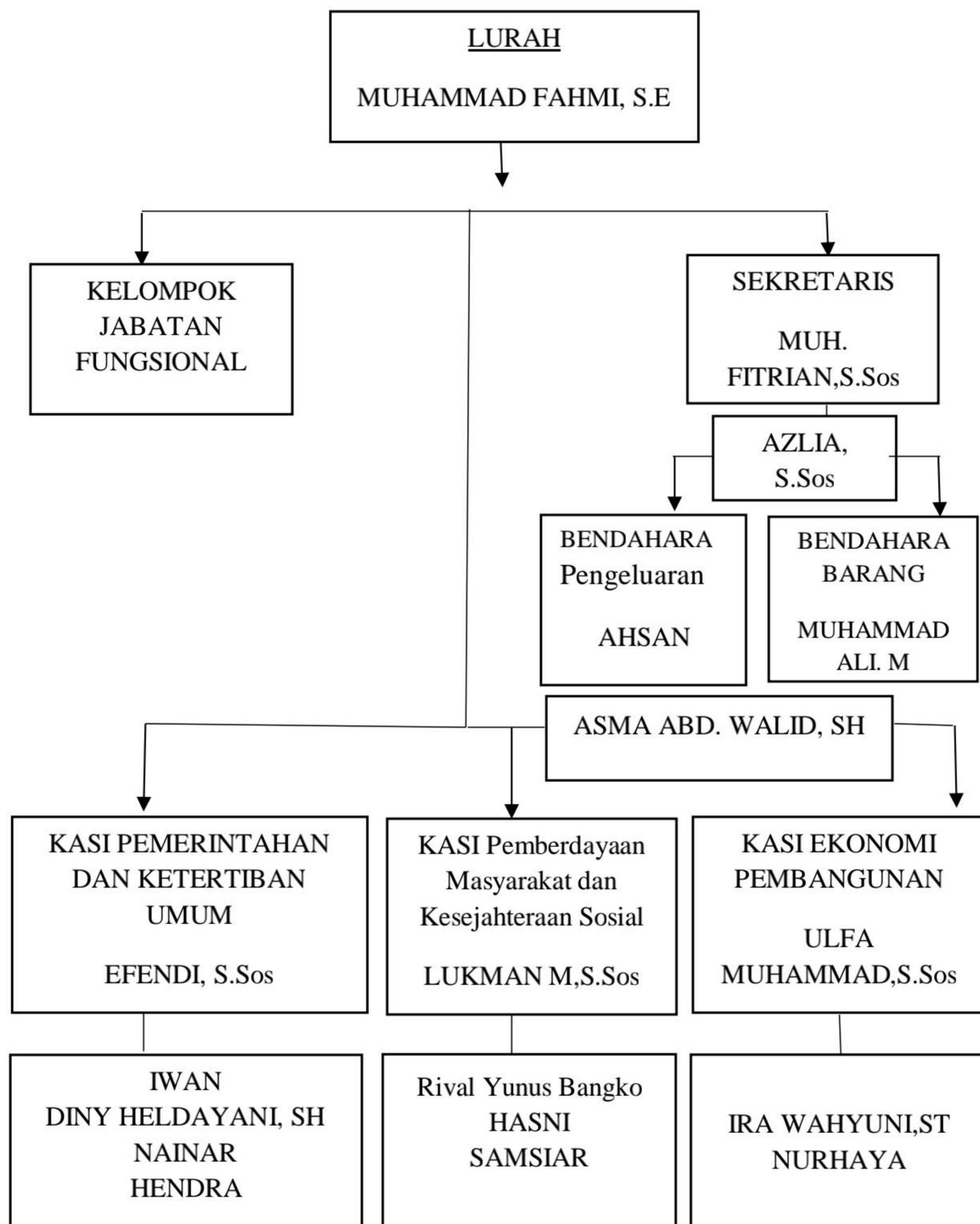
⁷⁰ Efendi Kasi pemerintahan dan ketertiban umum. *Wawancara, pada hari jum'at, 17 juni 2022*

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kelurahan Lere



3. Kondisi geografis kelurahan lere

Kelurahan Lere merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Palu Barat. Menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut (DPL)) berada di antara 0-180 m. Adapun luas wilayah kelurahan lere 2,97 km.⁷¹ Kelurahan Lere terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 33 rukun tetangga (RT). Adapun perbatasan wilayah meliputi:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Palu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baru dan Kelurahan Siranindi
3. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Palu
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Silae dan Kelurahan Kabonena

4. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Lere

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Palu jumlah penduduk di Kelurahan Lere berjumlah 10.450 jiwa dengan rasio penduduk laki-laki 5230 jiwa dan perempuan 5220 jiwa atau 2.701 KK dengan jumlah per rumah tangga rata-rata 5 orang.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena itu kita dapat melihat sejahterah atau tidaknya suatu masyarakat melalui beberapa indikator berikut:

⁷¹ Dokumen Kelurahan Lere 2019

a. *Indikator pemenuhan kebutuhan dasar*

1. Perumahan

Jika dilihat dari kondisi perumahan di Kelurahan Lere mayoritas rumahnya merupakan rumah dengan bangunan semi permanen dan merupakan hak milik. Namun pada tahun 2018 gempa melanda kota palu yang banyak menghilangkan rumah warga sekitar pesisir pantai Kelurahan Lere yaitu sebanyak 205 rumah.⁷²

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan menjadi faktor yang paling penting dalam penentuan kesejahteraan karena dengan kesehatan seseorang dapat melaksanakan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari jumlah layanan kesehatan yang ada di Kelurahan Lere adalah terdapat Puskesmas pembantu sebagai pusat pelaksanaan kegiatan kesehatan. Di bawah ini disampaikan jumlah sarana kesehatan serta petugas kesehatan yang ada di Kelurahan Lere tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Fasilitas Layanan Kesehatan Kelurahan Lere

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Rumah Bersalin	1
3.	Bidan	12

⁷² Efendi Kasi pemerintahan dan ketertiban umum. Wawancara, pada hari jum'at, 17 juni 2022

4.	Dokter	1
-----------	--------	----------

(Sumber dokumen Kelurahan Lere)

Dari tabel dapat di ketahui bahwa Kelurahan Lere memiliki 1 puskesmas pembantu, 1 rumah bersalin. Adapun jumlah petugas kesehatan 12 orang bidan dan 1 dokter.

3. Tingkat perlindungan

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat Kelurahan Lere adalah pemberian layanan pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) serta Kartu Keluarga (KK).

b. Tingkat kehidupan

1. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, karna kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda-tunda.

Tabel 4.2

Jumlah Pekerja Berdasarkan Bidang Pekerjaan Kelurahan Lere

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak Bekerja/tidak terdata	6700
2.	URT	1824

3.	PNS	500
4.	TNI/POLRI	40
5.	Wiraswasta	120
6.	Petani	30
7.	Pertukangan	36
8.	Pensiunan	120
9.	Karyawan Swasta	700
10.	Nelayan	140
11.	Dosen / Guru	200
12.	Tenaga Kesehatan	40
Jumlah		10.450

(Sumber: Data BPS Kelurahan Lere)

Dari tabel diatas kita ketahui bersama bahwa masyarakat kelurahan lere memiliki pekerjaan yang sangat bermacam-macam. Selain itu terdapat 6700 orang yang tidak bekerja, di dalamnya termasuk balita, kanak-kanak, pelajar dan mahasiswa serta penduduk berusia lanjut. Dilihat dari struktur pekerjaan, penduduk Kelurahan Lere lebu banyak kerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 700 dan terbanyak kedua yaitu PNS 500. Selebihnya tersebar ke

berbagai jenis pekerjaan atau mata pencaharian hidup seperti dosen/guru, nelayan, TNI/POLRI, wiraswasta. Pertukangan, buruh, pensiunan dan tenaga kesehatan.

2. Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu dengan pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas guna pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut kondisi tingkat pendidikan akademik yang ada di Kelurahan Lere.

Tabel 4.3

Sarana Pendidikan akademik di Kelurahan Lere

	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan anak usia dini (paud)	3
2	Taman kanak-kanak (TK)	3
3	Sekolah dasar (SD)	8
4	Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)	2
5	Sekolah lanjutan tingkat akhir (SLTA)	2

(Sumber: dinas pendidikan kota palu)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk sarana pendidikan di Kelurahan Lere sudah memadai. Bisa dilihat pada tabel yang tertera bahwa sarana pendidikan yang paling banyak jumlahnya adalah sekolah dasar yakni sebanyak 8 sekolah, diikuti Taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memiliki jumlah yang sama yakni 3, selanjutnya sekolah menengah pertama

(SMP) sama jumlahnya dengan sekolah menengah atas (SMA) yaitu sebanyak 2 sekolah.

Selanjutnya tingkat kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat pula dari kondisi pendidikan masyarakatnya. Bisa dilihat di data yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Kondisi Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jumlah Tamat Pendidikan
Kelurahan Lere

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum Sekolah	1771
2.	Tidak Tamat Sekolah	1310
3.	Tamat SD	1121
4.	Tamat SLTP	1520
5.	Tamat SLTA	3310
6.	DII	88
7.	D.III	190
8.	Sarjana	1140
Jumlah		10.450

(Sumber : dinas pendidikan kota palu)

Bila melihat data dari tabel tersebut bahwa pendidikan di kelurahan lere sudah cukup menggembirakan karena sebagian besar penduduk kelurahan lere bisa menyelesaikan pendidikannya hingga SLTA yaitu 3310 jiwa, di susul tamatan SLTP 1520 jiwa, kemudian hanya tamat SD 1121 jiwa, D.III sebanyak 190 jiwa, dan DII 88 jiwa.

4. Profil Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan 4 orang responden sebagai informan guna data primer peneliti. Penentuan informan tersebut karena mereka telah menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di kelurahan lere kecamatan palu barat, berikut data informan :

Tabel 4.5 Nama Informan

No	Nama	Jabatan	Tempat/Tanggal Interview
1.	Hairullah	Pendamping BPNT	Kantor Dinas Sosial Kelurahan Lere/ 17 Juni 2022
2.	Herni	Masyarakat	Kelurahan Lere/ 1 Juli 2022
3.	Farida	Masyarakat	Kelurahan Lere/ 1 Juli 2022
4.	Atika	Masyarakat	Kelurahan Lere/ 1 Juli 2022
5.	Fitrah	Masyarakat	Kelurahan Lere/ 2 Juli 2022

B. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat

Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Kelurahan Lere mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Pemilihan sebagai salah satu pelaksanaan program BPNT tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT. Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat merupakan salah satu Kelurahan yang mempunyai jumlah keluarga miskin yang cukup banyak.

Beberapa manfaat yang diharapkan adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat

meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping BPNT Terdapat 504 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 6 RW yang nantinya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) , nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu ATM berwarna merah atau kartu KKS dengan syarat mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, setelah itu kartu dapat diambil di Kelurahan Lere.⁷⁴

Wawancara dengan bapak Hairullah Selaku Pendamping BPNT :

“Besaran manfaat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jumlah yang diterima KPM untuk bulan Januari-februari tahun 2020 sebesar Rp.150.000/KPM/bulan dalam rangka mengurangi dampak pandemic covid-19, maka pemerintah menaikkan jumlah yang diterima oleh KPM sebesar Rp. 200.000/KPM . bantuan ini tidak bisa di ambil secara tunai dan dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui e-warong. Bahan pangan yang dapat bisah dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di e-warong menggunakan data bantuan dari Program BPNT adalah yang pertama sumber karbohidrat semacam beras yang kedua sumber protein hewani semacam telur,daging sapi, ayam atau ikan, yang ketiga sumber protein nabati semacam kacang-kacangan termasuk tempe tahu dan yang keempat sumber vitamin dan mineral semacam sayur-mayur dan buah-buahan”.⁷⁵

⁷³ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum, 6.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Hairullah, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17 Juni 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Hairullah, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17 Juni 2022

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping BPNT Terdapat 504 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 6 RW. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penerima program BPNT di Kelurahan Lere masih cukup banyak dan kemiskinan di Kelurahan Lere juga masih cukup banyak, sedangkan salah satu tujuan dari adanya suatu program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau menjadikan keluarga miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program BPNT di suatu daerah atau Desa, harus memenuhi seluruh indikator 6T ketepatan program BPNT, berdasarkan data pada lapangan bahwa diperoleh data sebagai berikut:

- a. Tepat sasaran adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin. Setiap Program yang dibuat oleh pemerintah diupayakan agar dapat tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukan tepat sasaran sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga dilaksanakannya program BPNT berjalan dengan baik. sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah disetiap daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penyaluran Program BPNT ini telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan dalam menentukan suatu

program BPNT diperlukan di sistem informasi yang baik dan pembinaan yang dilakukan secara intensif. Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak. Sehingga indikator ini penting digunakan untuk mengetahui efektifitas program.

Berdasarkan Wawancara oleh pendamping BPNT :⁷⁶

“Kriterianya itu harus berada basis data terpadu yang sekarang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% atau bisa disebut kurng mampu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping BPNT Kelurahan Lere dapat disimpulkan kriteria Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus berada di basis data terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara tentang ketepatan sasaran kepada masyarakat Penerima Bantuan mengatakan :

“yang saya rasa sudah tepat sasaran saya menerima bantuan ini karena pendapatan saya tidak menentu biasa pergi kerja membersihkan rumahnya orang kadang juga jadi tukang ojek nak dan suamiku sudah meninggal tidak ada sudah yang cari kan nafkah, adanya pogram ini dapat membantu saya memenuhi sebagian bahan pangan saya.⁷⁷”

Berdasarkan informan di atas menyatakan bahwa program BPNT ini sudah tepat sasaran dan berhak menerima bantuan di karenakan penghasilan masyarakat tidak menentu dan dia tinggal sendiri suaminya sudah meninggal cari nafkah sendiri pada masa pandemi ini masyarakat banyak mengeluh karena dia tidak bisah mencari nafkah.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Hairullah, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17 Juni 2022

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Herni, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

Pendapat lain yang dipaparkan oleh informan yang Non KPM : ⁷⁸

“Menurut saya Masih kurang tepat sasaran, kenapa saya bilang kurang tepat sasaran karena ada yang benar-benar kurang mampu tidak mendapatkan, tetapi justru yang berada dapat BPNT. ada juga dobel dapat bantuan dapat juga BST dapat juga BPNT mungkin salah input itu pendataan.”

Berdasarkan informan di atas menyatakan bahwa kurang tepat sasaran karena masyarakat yang miskin tidak mendapatkan tetapi masyarakat yang cukup mampu mendapatkan bantuan, ada beberapa masalah yang mengakibatkan masyarakat kecewa yaitu ada masyarakat sudah mendapatkan BPNT tapi dapat bantuan yang lain Berdasarkan dari hasil wawancara keseluruhan dan observasi peneliti menyimpulkan masih belum efektif program BPNT ini di Kelurahan Lere masih kurang tepat sasaran dikarenakan masih ada masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pengawasan program perlu dipantau lebih jauh seperti pihak pemerintah update informasi tentang kondisi keluarga penerima manfaat (KPM). Akan tetapi tidak mendapatkan sama sekali melainkan yang tidak berhak atas bantuan ini atau dikatakan mampu yang mendapatkan bantuan dan data dari Dinas Sosial masih belum diperbaharui secara maksimal yang menyebabkan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak dapat dan belum maksimal pendataan di Kelurahan Lere

⁷⁸ Wawancara dengan ibu fitrah selaku Non KPM 2 Juli 2022

- b. Tepat jumlah adalah beras dan telur untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dalam perbulan. Jumlah yang diterima oleh masing-masing rumah tangga yakni 10 kg beras, 1 rak telur dan 1 ekor ayam.

Berdasarkan hasil wawancara tentang tepat jumlah kepada masyarakat Penerima Bantuan mengatakan :⁷⁹

“Ibu Atika mengatakan Bantuan ini sangat bermanfaat karena sudah mengurangi biaya untuk membeli makanan, meskipun belum cukup dalam sebulan. Bantuan yang diterima biasanya habis dalam dua minggu dan bantuan yang didapatkan berupa beras sebanyak 10 kg dan telur sebanyak 1 rak telur dan 1 ekor ayam”.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa semua yang menerima program BPNT sudah sesuai dengan ketentuan yang ada berupa beras 10 Kg, telur 1 rak dan 1 ekor ayam.

- c. Tepat harga adalah harga beras dan telur yang diberikan kepada KPM sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak dipungut biaya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penerima program BPNT mengatakan gratis

Berdasarkan hasil wawancara tentang tepat harga kepada Masyarakat Penerima Bantuan mengatakan :⁸⁰

“Menurut Ibu Herni betul program BPNT ini gratis karena KPM mengambil langsung ke E-Warung dan tidak dikenakan biaya sepeserpun hanya menyerahkan kartu ATM.

Berdasarkan informan diatas bahwa program BPNT di Kelurahan Lere sudah tepat harga yaitu gratis.

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Atika, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Herni, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

- d. Tepat waktu adalah pembagian beras dan telur kepada KPM dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu sebulan sekali. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan program BPNT ini dibagikan tidak setiap bulan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang tepat waktu kepada masyarakat Penerima Bantuan mengatakan : ⁸¹

“Menurut Ibu Atika memang program BPNT ini harusnya dibagikan sebulan sekali, tetapi pernah dari bulan Maret 2022 sampai Juni 2022 tidak keluar sebulan sekali “

Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Disimpulkan bahwa program BPNT di Kelurahan Lere belum tepat waktu karena waktu penyaluran tidak menentu pada setiap bulannya. Sehingga masyarakat harus menutupi kebutuhan pangan sampai penukaran bantuan ewarOng , hal ini dikarenakan oleh pihak penyalur bantuan BPNT di salurkan pada tanggal yang sudah ditentukan dikarenakan keterlambatan saldo dari pusat. Keterlambatan penyaluran bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Sosial karena pihak pusat bekerja sama dengan Bank BRI yang merupakan penyalur untuk BPNT

- e. Tepat kualitas adalah kualitas beras dan telur layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 5 informan

⁸¹ Wawancara dengan ibu Atika, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

menjawab kualitas beras dan telur layak untuk di konsumsi. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Penerima Bantuan mengatakan :⁸²

“Menurut ibu Farida betul nak kualitas beras dan telur yang di berikan sangat baik dengan adanya bantuan ini sangat membantu sekali “

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa program BPNT di Kelurahan Lere ini sudah tepat kualitasnya.

- f. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa 5 informan menjawab tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima beras dan telur.

Berdasarkan hasil wawancara tentang tepat administrasi kepada masyarakat Penerima Bantuan mengatakan⁸³

“Ibu Farida mengatakan tidak ada persyaratan dalam mengambil beras dan telur tersebut cuman pada saat di awal itu ada persyaratan yaitu Kartu Keluarga (KK) sebagai pendataan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa indikator tepat administrasi program BPNT di Kelurahan Lere sudah terlaksana dengan baik, karena tidak adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima beras dan telur.

Berdasarkan indikator 6T diatas bawasanya program BPNT di Kelurahan Lere ini belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidak tepatan sasaran yang belum terpenuhi penerapannya di lapangan. Ketidak tepatan sasaran dalam hal ini menunjukan bahwa dari data yang diperoleh terdapat adanya keluarga yang

⁸² Wawancara dengan ibu Farida, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

⁸³ Wawancara dengan ibu Farida, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

kurang mampu tidak mendapatkan program BPNT dari Pemerintah. Masih ada keluarga miskin di Kelurahan Lere yang belum merasakan manfaat adanya program BPNT ini, seperti para rumah tangga pendatang yang status ekonominya dikatakan tidak mampu namun belum terdata oleh pihak kelurahan atas hak mereka menerima program BPNT. Dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat program BPNT seharusnya benar-benar dilakukan secara objektif tidak semata-mata memandang anggota keluarga lurah saja, yang keadaannya sudah mampu namun ingin mendapatkan program BPNT. Padahal masih banyak keluarga yang berhak merasakan manfaat program BPNT ini. Selain kurangnya tepat sasaran dalam pemberian program BPNT, adanya ketidaktepatan waktu dalam pembagian program BPNT yang seharusnya rutin sebulan sekali ini malah tidak menentu kapan keluarnya. Seperti pada kejadian yang terjadi pada bulan Maret sampai Juni dimana program tersebut keluar tiga bulan sekali, dan kurangnya tepat waktu dalam pemberian BPNT. Meskipun demikian indikator ketepatan kualitas, ketetapan administrasi, ketepatan harga dan jumlah sudah terlaksana dengan baik. Seluruh keluarga yang menerima program BPNT di Kelurahan Lere mengatakan ketepatan kualitas beras dan telur yang diberikan oleh pemerintah layak untuk di konsumsi. Dan ketepatan harga seluruh keluarga yang menerima program BPNT di Kelurahan Lere mengatakan harganya gratis. Dan ketepatan jumlah juga sudah tepat yaitu berupa beras 5 Kg, telur 1 rak telur dan ayam 1 ekor. dan ketetapan administrasi sudah terlaksana dengan baik karena dalam penyaluran tidak adanya persyaratan yang di penuhi. Berdasarkan hasil lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Kelurahan lere

belum memenuhi 6 indikator tercapainya suatu program BPNT. Karena hanya 4 indikator yang sudah terlaksana dengan baik yaitu ketepatan kualitas, ketepatan harga, jumlah dan administrasi. Untuk mencapainya kesuksesan suatu program BPNT dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi atau berjalan dengan baik.

C. Hambatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat

Pelaksanaan program bantuan pangan secara non tunai disusun melalui pedoman umum bantuan pangan sebagai tuntunan, arahan, atau acuan teknik pelaksanaan lapangan. Namun, pada realisasinya masih ditemukan hambatan dalam akses penyaluran bantuan tersebut. Adapun hambatan pelaksanaan BPNT sebagai berikut:

1. Adanya Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Ke Rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Sasaran bantuan disalurkan kepada masing-masing rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Namun, sering dijumpai saluran bantuan tidak tepat ke masing-masing rekening KPM atau sering disebut saldo nol (dana BPNT belum/tidak masuk ke rekening KPM BPNT). Fenomena saldo nol menjadi permasalahan yang umum terjadi di setiap instansi penyalur bantuan penyebabnya yaitu tidak terdaftar lagi dalam DTKS .

“Pak Hairullah (Pendamping BPNT) mengatakan: “Bantuan Pangan Non Tunai Yang Diterima KPM Melalui Uang Elektronik Tidak Selamanya Masuk Ke Rekening KPM Dalam Sebulan”⁸⁴

Jika terjadi bantuan yang tidak masuk ke rekening KPM atau saldo nol, tentunya membutuhkan cukup waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akibatnya pelaksanaan penyaluran bantuan non tunai mengalami hambatan. Adapun mekanisme penyelesaian meliputi:

- a. KPM BPNT melaporkan permasalahan saldo nol kepada Dinas sosial Daerah Kabupaten/Kota melalui pendamping sosial bantuan sosial pangan;
- b. Lakukan pengecek keaktifan Nik KTP dan cek sesuai KTP dan KK di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil)

2. Jarak yang Jauh Antara E-Warong Dan Kediaman KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Proses pemanfaatan bantuan oleh KPM dilakukan dengan cara mendatangi e-warong dengan membawa kartu kombo yang bertanda khusus non tunai dan sudah berkerja sama dengan Bank Penyalur. Pembelian bahan pangan dilakukan pada e-warong yang telah ditentukan, tidak sedikit KPM yang mengeluh atas jarak e-warong yang jauh dari kediamannya. Hal tersebut dirasakan oleh Ibu Atika (Ibu Rumah Tangga) mengatakan bahwa:⁸⁵

“Pada saat penyaluran untuk menerima bantuan di e-warong atau mengambil barang bantuan pangan yang jaraknya jauh jadi rumah saya, sehingga butuh transportasi lagi untuk membawa barangnya”.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Hairullah, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17 Juni 2022

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Atika, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

Keluhan para KPM, menjadi isyarat adanya kesulitan yang menghambat kelancaran bantuan sosial non tunai bagi penerima manfaat. Realitanya KPM sejatinya mendapatkan bantuan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Tetapi justru, untuk menerima bantuan tersebut, KPM harus mengeluarkan kembali uang transportasi demi mendapatkan bantuan pangan pada ewarong setempat.

3. Adanya Ketidak konsistenan Jadwal Penyaluran Bantuan Setiap Bulannya. Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen penyalur. Bank Penyalur adalah salah satu instrumen penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Proses pemindah bukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur. Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan.

“Ibu farida mengatakan mengatakan bahwa pelaksanaannya sudah bagus namun terkadang tidak sesuai dengan jadwal saat penyaluran dan pada saat waktu penyaluran yang terkadang berubah dan bantuan sebelumnya sudah habis”.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Farida, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

4. Adanya Permasalahan Kartu Rusak, Patah, Atau Terblokir/Error dan/Atau Kartu Hilang.

Menurut Pak Hairullah (Pendamping BPNT) mengatakan bahwa: “Terkadang kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) bermasalah sehingga menghambat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima bantuan” Permasalahan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dimaksud oleh Pak hairullah (Pendamping BPNT) seperti, kartu rusak, patah atau terblokir/error dan/atau kartu hilang.⁸⁷

Peluang untuk memenuhi solusi dari hambatan tersebut dengan melakukan tahapan:

- a. KPM BPNT melaporkan permasalahan kartu rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang kepada Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota melalui pendamping sosial bantuan pangan sosial
- b. Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota melaporkan ke kantor cabang Bank Penyalur dengan tembusan ke Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta memberikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan data nama dan alamat ditambah nomor rekening dan nomor kartu kombo serta melampirkan kartu rusak dan masalah kartu lainnya;
- c. Kantor cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis dan mengganti kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error dan kartu hilang paling lambat 14 (Empat belas hari). Namun, kartu hilang dibebankan biaya Rp. 15.000.00;

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Hairullah, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Lere, pada tanggal 17 Juni 2022

- d. Kantor Cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota dan Kantor Pusat Bank Penyalur Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota secara tertulis kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku pengguna anggaran;
 - e. Bank Penyalur pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran.⁸⁸
5. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Tidak Melakukan Pelaporan Alamat Saat Pindah Rumah (Domisili) Atau Meninggal Dunia. Pada mekanisme pemberitahuan kepada KPM BPNT melalui surat pemberitahuan terdapat informasi mengenai identitas KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara valid yang dikuatkan melalui pengecekan keberadaan KPM BPNT yang dilakukan oleh Bank Penyalur, Tim Koordinasi Bantuan Pangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Bantuan Sosial. Berbeda halnya jika KPM yang memberikan alamat yang keliru atau bahkan tanpa melakukan pelaporan berkala apabila berpindah domisili atau kediaman, sehingga proses survei mengalami hambatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan KPM sebagai penerima bantuan pangan non tunai.

⁸⁸ Pedoman Umum Program Sembako 2020, 79

“Kendala tersebut secara tegas di sampaikan oleh Ibu Farida (Ketua Kelompok BPNT) bahwa: “Biasanya KPM memberikan alamat yang berbeda atau tidak melapor saat pindah rumah, sehingga sulit dilakukan survei dan terdapat hasil survei yang berbeda antara data KPM dan keadaan sekarang KPM”⁸⁹

Kebenaran identitas dan data KPM adalah urgensi yang patut menjadi perhatian pemerintah pusat hingga pedesaan maupun pendamping. Ukuran keberhasilan program tidak akan dapat terwujud apabila masih banyak permasalahan yang menyangkut pendataan, sebab cikal bakal lahirnya suatu program khususnya BPNT dikarenakan adanya pendataan tertentu.

6. Masih Ada Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Penerima manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai, yang disebut KPM. Sesuai dengan pedoman dan aturan pelaksanaan bantuan sasaran bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi 25 % terendah di daerah pelaksanaan. Dari hasil temuan di lapangan, BPNT di Kelurahan Lere masih memberikan bantuan bagi orang yang berkecukupan.

Wawancara dengan ibu herni selaku penerima BPNT :

“Ibu Herni yang mengatakan bahwa: “Sebahagian penerima BPNT sudah tepat tapi memang ada beberapa KPM yang sejahtera namun masih menerima bantuan itu”⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Farida, selaku penerima BPNT dan ketua kelompok BPNT pada tanggal 1 juli 2022

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Herni, selaku penerima BPNT pada tanggal 1 juli 2022

Program Bantuan Pangan Non Tunai Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ajaran ekonomi Islam berprinsip mewujudkan keseimbangan dan juga adil. Maka dari itu ajaran hukum Islam menempatkannya secara proporsional antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Dari sudut pandang seperti itu, seharusnya penyaluran bantuan BPNT dapat dibuatkan regulasi yang dapat memenuhi rasa aman. Islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh islam dalam mengentaskan kemiskinan adalah himbuan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya, seperti zakat, sedekah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan jaminan sosial.

Dalam Islam agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzoliman dan arogansi. Dalam pelaksanaan BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Tolong Menolong

Perlindungan terhadap warga penerima bantuan adalah tuntunan ajaran Islam. Hal ini dikuatkan dengan Nash, Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan :

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁹¹

Dalam Tafsir al-Muyassar QS. Al-Maidah ayat 2 menjelaskan Dan tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum Mukminin,dalam mengerjakan kebaiakan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa,maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan wasapadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaannya.⁹²

1. Keadilan

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Keadilan yaitu menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran keberanian dan konsisten pada kebenaran. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁹³

⁹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 86

⁹² [http://www. Tafsir web.com](http://www.Tafsirweb.com). *Tafsir Al-Muyassar* Html Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

⁹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 267

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dengan seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan, Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah silap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT.⁹⁴

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Dalam mengetahui program BPNT di Kelurahan Lere termasuk tidak tepat sasaran dalam memberikan beras dan telur, hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat atau keluarga yang membutuhkan yang tidak mendapatkan manfaat program BPNT ini.

2. Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan sebagai pengayom masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- Muddassir ayat 38 sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahan :

⁹⁴ Al- Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyiqi, Tafsir Ibnu Katsir juz 6,(Bogor,Pustaka Asy'syafi'i, 2004).

*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,*⁹⁵

(Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya) Yakni dirinya tersandra oleh amal perbuatannya, bisa jadi amalannya akan menyelamatkannya atau akan membinasakannya.⁹⁶

Dalam program BPNT di Kelurahan Lere tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik antara koordinator dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena setiap program BPNT mau keluar koordinator memberitahukan kepada KPM. Namun kalau tanggung jawab Kecamatan atau Desa tidak ada tanggung jawabnya karena ini program dalam bentuk kartu ATM yang dimana didalamnya terdapat nama dan sandinya dengan saldo Rp.110.000 perbulan yang dapat di tukarkan di E-warung (warung khusus program BPNT) berupa 5 Kg beras dan 2 Kg telur. Dan yang menerima yang hanya punya kartu saja tidak bisa sembarang orang.

3. Tafakul (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak

⁹⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2001), 108

⁹⁶ [http://www. Tafsir web.com](http://www.Tafsirweb.com). *Zubdatu Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah*. Html Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022

hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Adapun Allah SWT berfirman dalam {QS, Az-Zariyat 51:19}

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan :

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.⁹⁷

(Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian) Makna yakni orang fakir yang tidak memiliki apapun, kemudian meminta bantuan dari orang lain. Sedangkan yakni orang yang tidak mampu bekerja, namun dia menolak untuk memintaminta, sehingga dianggap orang lain sebagai orang yang tidak butuh bantuan, sehingga tidak ada orang yang bersedekah kepadanya. Pendapat lain mengatakan ia adalah orang yang tertimpa musibah. Adapun tafsiran ayat diatas yaitu dalam harta mereka ada bagian untuk orang fakir yang tidak memiliki apapun dan orang lemah yang tidak mampu melakukan usaha apapun.⁹⁸

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasannya program BPNT di Kelurahan Lere dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam belum dapat dikatakan adil, karena masih belum tepat sasaran atau masih menggunakan data lama jadi keluarga yang sudah sekiranya mampu masih mendapatkan bantuan tersebut padahal diluar sana masih banyak yang membutuhkannya, dan masih kurang

⁹⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2001), 108

⁹⁸ [http://www. Tafsir web.com](http://www.Tafsirweb.com). *Zubdatu Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah*. Html Diakses pada tanggal 24 Juli 2022

adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya program BPNT bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Tapi program ini dapat dikatakan tanggung jawab dan jaminan sosial. Dan program BPNT di Kelurahan Lere dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam menurut Imam Ghazali dapat dilihat dari fungsi kesejahteraan sosial, yaitu: AdDharuriyat (Kebutuhan Pangan), Al-Hajiyat (Kebutuhan Sekunder), dan Tahsiniyat (Kesempurnaan). Berdasarkan implementasi program BPNT di Kelurahan Lere, bahwa program BPNT ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan Ad-Dharuriyat (Kebutuhan Pangan) saja yaitu hanya mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian secara umum Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat berjalan cukup baik dan lancar, namun masih ada beberapa hambatan atau kendala yang menyebabkan program ini kurang efektif. Adapun hambatan atau kendala dihadapi yaitu karena belum dapat memenuhi indikator 6T yaitu: tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya dapat memenuhi 4 indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan administrasi. Dan program BPNT di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya. Karena program BPNT di Kelurahan Lere ini hanya dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam membeli beras dan telur, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan yang lain.
2. Adapun Hambatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Lere yaitu: Adanya ketidaktepatan sasaran bantuan pangan ke rekening KPM, Jarak yang jauh antara e-warung dan kediaman KPM, Adanya Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya,

Adanya permasalahan kartu rusak, kartu patah, atau terblokir/error, dan atau kartu hilang, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak melakukan pelaporan alamat saat pindah rumah (domisili) atau meninggal dunia.

3. Program BPNT guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu hanya dapat memenuhi tanggung jawab dan tafakul (Jaminan Sosial) saja. Jadi program ini sebagai bentuk jaminan sosial dan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakatnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulisan dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya tinjauan ulang ke lapangan dari pihak yang kompeten agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran.
2. Di harapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang masih menerima program BPNT untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartunya, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan program BPNT ini.
3. Pihak Pemerintah diharapkan dapat mengupayakan pendistribusian program BPNT di Kelurahan Lere agar berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian dan sesuai dengan indikator tepat waktu.
4. Untuk tercapainya kesuksesan pelaksanaan program BPNT dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi dan berjalan dengan baik. Sesuai dengan indikator 6T yang telah ditetapkan. Masyarakat diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk bersikap aktif dalam melakukan kontrol setiap kebijakan penguasa yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan mengurus urusan umat. Dimana, hendaknya bersikap kritis bila ditemukan adanya kebijakan tersebut yang bertentangan dengan konsep islam, seperti dalam pelaksanaan program BPNT kepada masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 388
- Abdul Ghofur Noor Ruslan, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63.
- Ahmadi Abu, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 326.
- Ahmad Marwadi, —Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahil, *Jurnal Ilmiah keislaman*, (Pekan baru) Vol. 5 Nomor 2, 2006, 294-296.)
- Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 50-51.
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita, 1999), 88.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* (Ed. 2, Cet. 9; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.
- Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), 126
- Balqis Adinda Syifa Dinarila, Dkk. (2020). —Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. | *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 20.
- Budi Cantika Sri Yuli, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam* (*Jurnal Ekonomika-Bisnis*: Vol. 4 No. 2 Juli 2013), 103
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Gitamedia Pres), 50.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI&ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.383.
- Evriliany Akmel Jheniar, “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin, h. 36
- Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan* , 12

- Farida Ulfa Jamilatul, *Memahami Konsep Al-falah Melalui Penguatan Ketahanan Pangan dalam World Islamic Economic Forum (WIEF)*, (Journal of Islamic Economic Lariba: Vol 1, No. 1, 2015)
- Ghony Djunaid dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012), 165-199.
- Harahap Isnaini, Marliyah dan Bambang Irawan, *Islam dan Isu Keuangan Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, November 2015), 154
- Harun Nurlaila, —Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan, (t. Tp: t.np.,t.t.), 12.
- Ilmi Syaiful, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmu Syari'ah: Vol. 13 No. 1, April 2017), 76-82
- Ismail Munawar, Dwi Budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sistem Ekonomi Indonesia Tasrifan Pancasila & UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2002), 56.
- Jm Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330-331.
- Kartiawati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), 38
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Umum Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin* (Jakarta, 2011), 1.
- M. Anwas Oos, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: ALFABETA), 83
- Munandar Soelaeman M, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 228
- Nurfitriah, *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (studi pada masyarakat Desa Bou Kecamatan Sojol)* (Skripsi Febi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu (2020)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 4.

- Panggayuh Singgih, Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dalam Skripsi, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2014, 26.
- Rachman Benny, Adang Agustian, Wahyudi, *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, 2018)
- Ramadhan Tondhi, Syamsul Bahri, Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru, (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 5 Edisi II, 2018)
- Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara" Jurnal Geografi, Vol 9 No.1, 2017, 57.
- Sakaruddin M Aspar, Syakhrudin Dn. (2020). "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar." Jurnal Washiyah Volume 1, no. 2.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.
- Sodiq Amirus, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), 95.
- Suharto Edi, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013), 88- 89.
- Sugiyono. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suryawati Chriswardani, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08, No. 03, September, 2005), 112
- Sutrisno Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar: Kencana, 2007), 125- 126.
- Syaodih Sukmadinata Ana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja, 2002), 13.

- Tiara Rohana, —Demography Journal of Sriwijaya (DeJos) Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),|| 2019, 37–46.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta Pusat: Undang-Undang, 2017), 5.
- TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019, 2*
- Triana Ayu, “Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi organik dan anorgani” (Skripsi, fakultas pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), 32.
- Umar Husein, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 73
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (1).
- Yetti Misra “Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011, hlm. 33- 34
- Yuliyani, *Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*, (Iqtishadia: Vol. 8, No. 1, Maret 2015), 152.
- Yusuf Yustina dkk (2019) —Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.||
eJournal Administrasi Negara, 7 (3): 2019 : 9215-9227 ISSN 0000-0000
(Cetak), Ejournal.an.fisipUnmul.ac.id

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

1. Koordinator Sekaligus Pendamping BPNT Kelurahan Lere
 - a. Bagaimana Gambaran Umum Program BPNT di Kelurahan Lere ?
 - b. Apa Saja Kriteria Sehingga Bisa menjadi penerima BPNT ?
 - c. Apakah ada kendala dalam penyaluran BPNT ?

2. Penerima BPNT Kelurahan Lere
 - a. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya program BPNT ?
 - b. Apakah penyaluran program BPNT pada Kelurahan Lere sudah tepat sasaran ?
 - c. Apakah dalam penyaluran bantuan anda pernah mengalami kendala ?
 - d. Apakah jumlah sembako yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yaitu senilai 10 kg beras dan 1 rak telur ?
 - e. Bagaimana kualitas beras dan telur yang diberikan kepada KPM apakah sudah layak untuk dikonsumsi ?
 - f. Apakah pembagian sembako sudah tepat waktu ?
 - g. Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima BPNT ?
 - h. Apakah dalam dalam penerimaan BPNT sudah tepat harga ?

Lampiran

Dokumentasi

Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kelurahan Lere



Wawancara dengan Pendamping BPNT



Wawancara dengan ibu Farida selaku penerima BPNT



Wawancara dengan ibu atika penerima BPNT



Wawancara dengan ibu Herni penerima BPNT



Foto dengan ibu masni selaku penerima BPNT



Foto dengan ibu fitriah selaku penerima BPNT



Foto dengan ibu Dahniar selaku penerima BPNT



Wawancara dengan ibu fitrah selaku non KPM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Nur Afifah
TTL : Palu, 24 April 1999
Nim : 183120041
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Asam II
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Facebook : Nur Afifah
Instagram : nrafifah_24
E-mail : nrafifah019@gmail.com
No Hp : 081210461954

2. Riwayat Pendidikan

SD : SD Inpres 3 Lere
SMP : SMP Al-Khairaat 1 Palu
SMA : Man 1 Kota Palu



Nomor : 3822 / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 08 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi
Kepada Yth,
Bapak/Ibu.....
Di

Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NUR AFIFAH
NIM : 183120041
Judul Skripsi : ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Jam : 10.45 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Seminar/Borang FEBI (Lt. II Gd. M)
Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



Dekan
Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



**PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS SOSIAL**

Jalan. Bantilan Nomor. 25 Telepon. (0451) 8448494, Faxmile (0451) 8448494,
Kode Pos 94221

SURAT KETERANGAN
Nomor 807 / 31 / DINSOS/SET/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WALAWATI, SE
NIP : 19691115 199803 2 004
Pangkat/gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR AFIFAH
NIM : 183120041
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN Datokarama Palu

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian Skripsi yang berjudul "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat" di kantor Dinas Sosial Kota Palu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 20 Juni 2022

a.n. **KEPALA DINAS SOSIAL**

PEMERINTAH KOTA PALU
Sekretaris,

WALAWATI, SE
Pembina Tk.I
NIP 19691115 199803 2 004



**PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN PALU BARAT
KELURAHAN LERE**

JALAN PANGERAN HIDAYAT NO 18 KODE POS 94221 PALU

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 140.09/307 / VI / 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EFFENDI, S. Sos**
Jabatan : KASI Pemerintahan
NIP : 19720817 199303 1 010

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : **NUR AFIFAH**
NIM : 18.3.12.0041
Universitas : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Telah melakukan Penelitian yang berjudul **Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat)**. Adapun lokasi penelitian di wilayah Kelurahan Lere dan penelitian dilakukan selama **1 (Satu)** hari.

Demikian Surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Juni 2022

Mengetahui,
a.n **LURAH LERE**
KASI PEMERINTAHAN


EFENDI, S. Sos
NIP. 19720817 199303 1 010



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Nur Afifah NIM : 183120041
 TTL : Palu, 24 April 1999 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jurusan : Ekonomi Syariah Semester : VI (ENAM)
 Alamat : Jl. Asam II HP : 082251441835

Judul :

- 4/6/21
 Judul I
 Analisis Efektivitas Program bantuan pangan non tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus Kelurahan Ite Kecamatan Palu Barat.)
- Judul II
 Pemanfaatan media sosial fb. sebagai media promosi perspektif ekonomi Islam studi pada pelaku usaha milenial Kelurahan Ite Kecamatan Palu Barat
- Judul III
 Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program non tunai (studi deskriptif kuantitatif) Persepsi masyarakat terhadap program BPNT (studi kasus Kelurahan Ite Kecamatan Palu Barat)

Palu, 10 - Juli - 2021
 Mahasiswa,

Nur Afifah
 NIM 183120041

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I :
 Pembimbing II :

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Kelembagaan,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
 NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

Dr. SITI MUSYAHIDAH, M.Th.1
 NIP. 196707101999032005

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 572 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Membaca** : Surat saudara : **Nur Afifah / NIM 18.3.12.0041** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang **pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : Analisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)**
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

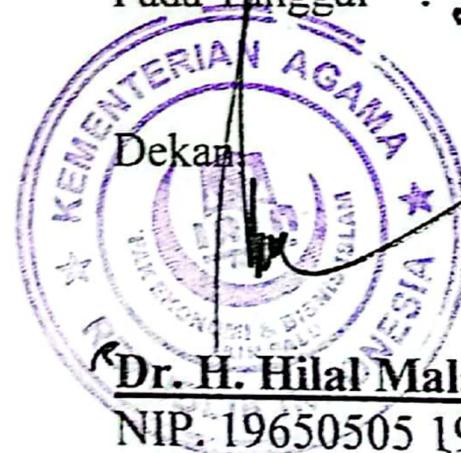
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- Pertama :** 1. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. (Pembimbing I)
2. Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak. (Pembimbing II)
- Kedua :** Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat :** Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 21 Juni 2021



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;